

SERTIFIKASI GURU Irjen Harus Periksa

PALU, MERCUSUAR- Kisruh pemotongan dana tunjangan sertifikasi guru bulan Desember 2010, sudah saatnya ditangani oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Langkah ini untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Anggota-PPD RI asal Sulteng Hj Nurmawati Dewi Bantilan mengatakan, instansi pengawasan dan pemeriksaan di lingkup pendidikan nasional, hendaknya turun memeriksa kasus pengelolaan dana tunjangan sertifikasi guru di Sulteng. Sehingga bisa ditelusuri permasalahan dan penyebab yang sebenarnya.

"Ini untuk menghindari fitnah, apalagi di bulan puasa ini. Sehingga, langkah pemeriksaan harus segera dilakukan," kata Nurmawati Bantilan usai menghadiri acara buka puasa bersama dengan anak panti asuhan di Panti Asuhan Walisongo Palu, Kamis (4/8).

Baca IRJEN di hal.11

Manfaatkan Wakil Rakyat

IRJEN

sambungan dari hal. 1

Nurmawati Bantilan mengaku heran jika dalih belum dibayarkan tunjangan sertifikasi guru karena alasan pemerintah pusat belum mencairkan dana tunjangan sertifikasi tersebut. "Pemerintah pusat yang mana ini. Harus diperjelas, karena skopnya sangat luas kalau berbicara pemerintah pusat," ujarnya.

Menurut senator yang membidangi sektor Pendidikan itu, penggelontoran dana sertifikasi selalu mengacu pada penggelontoran tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya pemerintah pusat mengalokasikan pembayaran satu tahun penuh, maka akan dilakukan hal yang sama untuk tahun berikutnya. "Heran kalau kemudian berkurang satu bulan," tanyanya.

Untuk itu lanjutnya, dalam kasus tunjangan sertifikasi guru yang belum sepenuhnya dibayarkan kepada guru yang berhak menerimanya, perlu ada itikad baik dari pihak terkait agar tidak menghambat program peningkatan mutu pendidikan di Sulteng. Kalau memang sumbataannya dari pemerintah pusat, mengapa tidak menggunakan kekuatan wakil Sulteng yang duduk di Senayan.

"Kita ini ada sepuluh orang. Ini yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menelusuri kebenaran tunjangan sertifikasi guru belum dibayarkan pada bulan Desember 2010," tegasnya.

Dikatakan Dewi panggilan akrabnya, pemerintah pusat telah memberi perhatian lebih pada program pendidikan di Sulteng dengan mengucurkan anggaran sekitar Rp 200 miliar pada 2011 untuk seluruh kabupaten/kota dan provinsi. "Untuk kejelasannya, tanya Pak Akbar (Zulfakar Sipanawa) karena dia banyak tahu

hal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palu, Ardiansyah Lamasitudju mengatakan, dana tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan adalah tunjangan bulan Desember 2010, untuk guru angkatan 2009. Mengapa tunjangan ini belum dibayar, Dikda Sulteng yang paling mengetahui.

"Setahu saya ada guru yang tunjangan sertifikasinya belum terbayarkan di bulan Desember 2010, tapi itu adalah angkatan 2009, bukan angkatan 2010. Kalau untuk angkatan 2010, semuanya sudah kami bayarkan dan tidak ada masalah. Untuk angkatan 2009, silakan tanyakan saja ke Dikda Sulteng," kata Ardiansyah belum lama ini.

Menurut dia, kewajiban Disdik Palu dalam pembayaran tunjangan tersebut hanya pada guru yang bersertifikasi angkatan 2010 saja. Sehingga, jika ada guru yang belum terbayarkan haknya diluar angkatan 2010, itu bukan menjadi kewenangan Disdik Palu.

Terkait hal ini, Kepala Dikda Sulteng, Abubakar Almahdali membenarkan bahwa pihaknya belum membayarkan tunjangan guru angkatan 2009 di Bulan Desember 2010. Hal itu disebabkan kurangnya dana dari pusat. Malahan, kata dia, di Sulteng itu terbilang bagus, sebab di sejumlah daerah lain, tunjangan sertifikasi belum terbayar selama beberapa bulan.

"Untuk Sulteng memang anggaran dari pusat tidak cukup, makanya belum terbayarkan untuk bulan Desember 2010. Ini karena anggaran dari pusat yang kurang, ini masih mendingan kalau daerah lain itu sampai beberapa belum

terbayar," kata Abubakar.

Kisruh dana tunjangan sertifikasi guru bermula saat hak 2.000 guru se Kota Palu itu dipotong. Setiap bulan, tunjangan sertifikasi dipotong sebesar 15 persen. Selain itu, tunjangan sertifikasi itu juga hanya dicairkan 11 bulan pada tahun 2010.

Direktur Lipkada Sulteng, Andi Ridwan mengatakan, tunjangan sertifikasi yang diberikan kepada seorang guru sebesar satu bulan gaji. Saat ini, katanya, gaji seorang guru yang telah bersertifikat paling rendah Rp 2,1 juta. Artinya, setiap bulan, seorang guru berhak memperoleh tunjangan sebesar Rp 2,1 juta tersebut.

Namun kenyataannya, sambung Ridwan, tunjangan tersebut dipotong sebesar 15 persen plus setahun hanya diberikan tunjangan 11 bulan. Anehnya, jika potongan 15 persen itu adalah potongan pajak, setiap guru tidak pernah diperlihatkan bukti pembayaran pajaknya. Dikawatirkan, karena tidak memiliki slip pembayaran pajak, maka guru tersebut bisa kembali dikenakan pajak, sehingga setiap bulannya bisa membayar ganda.

Dia menambahkan, jika gaji guru minimal Rp 2,1 juta, terus dipotong 15 persen, maka uang yang terkumpul dari potongan itu mencapai Rp 630 juta (15% x Rp 2,1 juta x 2.000 orang). Kemudian jika ditambahkan dengan potongan tunjangan selama sebulan (guru hanya memperoleh tunjangan selama 11 bulan), maka uang yang terkumpul mencapai Rp 4,2 miliar (Rp 2,1 juta x 2.000 orang). Dengan demikian, dalam setahun, potongan tunjangan sertifikasi guru mencapai Rp 4,830 miliar. DWIGUS